

# ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN MUKIM DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

Anita Surya Al-Yahya

Program Pasca Sarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
anita.nhita@yahoo.com

## ABSTRACT

*The effectiveness of the Mukim Government in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency is an important study in the administration of government activities which oversees several villages and is directly under and responsible to the Camat. Based on the results of the research on the effectiveness of the Mukim Government in general it has not gone well. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the Mukim Government in Johan Pahlawan District, the factors that influence it, as well as the strategies undertaken in increasing the effectiveness of the Mukim Government in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, Aceh Province. This is influenced by organizational characteristics; environmental characteristics; factor characteristics of workers; and the characteristics of management policies and practices. The right strategy and priority is based on the SWOT and Litmust Test analysis to improve the effectiveness of the Mukim Government, namely: providing training to increase the capacity of the apparatus; clarify and detail the authority of the Mukim Government through regulation; explore and utilize the potential resources available in the Settlements; provide adequate facilities / parasana.*

**Keywords:** *effectiveness, mukim, mukim government, implementation of mukim government*

## ABSTRAK

Efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan studi penting dalam administrasi kegiatan pemerintah yang mengawasi beberapa desa dan secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Pemerintah Mukim secara umum hal itu belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Efektivitas Pemerintah Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Ini dipengaruhi oleh karakteristik organisasi; karakteristik lingkungan; karakteristik faktor pekerja; dan karakteristik kebijakan dan praktik manajemen. Strategi dan prioritas yang tepat didasarkan pada analisis SWOT dan Uji Litmust untuk meningkatkan efektivitas Pemerintah Mukim, yaitu: memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur; memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi; mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia di Permukiman; menyediakan fasilitas / parasana yang memadai.

**Kata kunci:** efektivitas, mukim, pemerintahan mukim, implementasi pemerintahan mukim

## PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik bisa menekankan peran pemerintah sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi dan kewenangan. Perubahan kebijakan di wilayah Aceh ditandai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembagian struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa, "Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong". Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim tidak hanya sebagai lembaga adat melainkan pula sebagai lembaga pemerintahan.

Secara *de jure* Pemerintahan Mukim telah diakui namun secara *de facto* implementasi tugas-tugas Mukim lebih cenderung difungsikan dalam kegiatan adat istiadat atau penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Keberadaan Pemerintahan Mukim menghadapi berbagai permasalahan, baik struktur organisasi dan manajemen yang masih lemah, sistem administrasi yang lemah, belum sempurnanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Mukim dengan Pemerintahan Gampong, belum jelasnya mekanisme pendanaan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dan lain sebagainya. Maka diperlukan kajian untuk dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menganalisis Efektivitas, faktor-faktor, serta strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan efektivitas Organisasi Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh

Barat Provinsi Aceh. Penelitian ini berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Mukim Dalam Kabupaten Aceh Barat.

## GAMBARAN UMUM KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN

### Kondisi Geografis dan Demografis

Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Meulaboh sebagai Ibukota pemerintahan kecamatan. Wilayah Kecamatan Johan Pahlawan memiliki batas-batas administrasi wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samatiga sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meureubo.

Jumlah penduduk Kecamatan Johan Pahlawan tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik sebesar 63.975 jiwa yang terdiri dari 32.441 jiwa penduduk laki-laki dan 31.534 jiwa penduduk perempuan.

### Kondisi Pemerintahan dan Sosial Budaya

Secara administrasi, Kecamatan Johan Pahlawan terdiri dari 4 Mukim, 21 Gampong, dan 86 Dusun.

Di bidang pendidikan, berdasarkan data Kecamatan Johan Pahlawan dalam angka tahun 2017 terdapat 36 TK/RA, 37 SD/MI, 13 SMP/MTs, 13 SLTA/MA/SMK, dan 9 Akademi/Perguruan Tinggi. Sedangkan di bidang keagamaan, masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan 100% menganut agama Islam dan dilengkapi dengan 57 sarana ibadah.

## KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### Penelitian Terdahulu

Efektivitas sebuah organisasi pemerintahan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Keberadaan Pemerintahan Mukim dalam

struktur pemerintahan di Aceh, menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti untuk melakukan kajian dan analisa yang lebih mendalam. Berbagai penelitian terkait dengan Pemerintahan Mukim ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dengan hasil kajian dan analisa yang berbeda-beda.

Dari beberapa penelitian belum ada yang secara persis membahas tentang efektivitas organisasi Pemerintahan Mukim di Kecamatan

Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini lebih menekankan pada dimensi efektivitas organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian tentang efektivitas organisasi Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, masih sangat relevan untuk dilakukan kajian dan analisa lebih mendalam. Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu:

No.	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
		<i>Efektivitas Organisasi Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh</i>	
		Persamaan	Perbedaan
1.	<p><b>Peneliti :</b> Muzakir dan Husaini Ibrahim</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> Tahun 2017</p> <p><b>Judul :</b> Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)</p> <p><b>Metode Penelitian :</b> Kualitatif – Deskriptif</p> <p><b>Teori :</b> Teori Peranan dan Kearifan Lokal</p> <p><b>Hasil :</b> Keberadaan Mukim masih sebatas simbol adat yang tidak memiliki kuasa pemerintahan. Perlu upaya yang strategis untuk merevitalisasi kembali institusi Mukim sehingga benar-benar memiliki daya kuasa sebagai sebuah lembaga yang mandiri, otoritatif, dan berdaulat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penelitian : Kualitatif-Deskriptif</li> <li>- Obyek Penelitian : Mukim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode pada Rencana Penelitian diperkuat dengan analisis SWOT</li> <li>- Fokus Rencana Penelitian adalah Efektivitas Organisasi Mukim, sedangkan Fokus Penelitian Terdahulu adalah Peran Mukim</li> <li>- Teori yang digunakan pada Rencana Penelitian adalah Teori Efektivitas Organisasi, sedangkan pada Penelitian Terdahulu adalah teori Peranan dan Kearifan Lokal</li> <li>- Lokasi Rencana Penelitian adalah Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sedangkan pada Penelitian Terdahulu adalah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar</li> </ul>
2.	<p><b>Peneliti :</b> Sulaiman Tripa dan Taqwaddin Husin</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> Tahun 2015</p> <p><b>Judul :</b> Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penelitian : Kualitatif</li> <li>- Obyek Penelitian : Mukim</li> <li>- Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode pada Rencana Penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif dan diperkuat dengan analisis SWOT, sedangkan pada Penelitian Terdahulu menggunakan study normatif</li> <li>- Fokus Rencana Penelitian adalah Efektivitas Organisasi Mukim, sedangkan pada Penelitian Terdahulu adalah Arah Pengaturan Tata Batas Mukim</li> </ul>

	<p><b>Metode Penelitian :</b> Kualitatif – Study Normatif</p> <p><b>Teori :</b> Kebijakan Publik</p> <p><b>Hasil :</b> Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Mukim belum mengatur secara rinci dan jelas terkait harta kekayaan Mukim dan Tata Batas. Perlu dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Batas Mukim dan pengelolaan sumber daya alam wilayah Mukim, agar Qanun Mukim menjadi operasional dan implementatif di lapangan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori yang digunakan pada Rencana Penelitian adalah Teori Efektivitas Organisasi, sedangkan penelitian terdahulu adalah teori Kebijakan Publik</li> <li>- Lokasi Rencana Penelitian lebih fokus di Kecamatan Johan Pahlawan</li> </ul>
3.	<p><b>Peneliti :</b> Mukhlis</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> Tahun 2015</p> <p><b>Judul :</b> Perkembangan Mukim di Aceh</p> <p><b>Metode Penelitian :</b> Kualitatif – Deskriptif</p> <p><b>Teori :</b> Pengembangan Kelembagaan</p> <p><b>Hasil :</b> Perkembangan Mukim di Aceh dipengaruhi oleh perkembangan politik dan pemerintahan di setiap masanya. Mukim di Aceh perlu ditata (dievaluasi) kembali, terutama keberadaan (komposisi) mukim itu paling sedikit terdiri dari tiga (3) Gampong.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penelitian : Kualitatif-Deskriptif</li> <li>- Obyek Penelitian : Mukim</li> <li>- Lokasi Penelitian : Aceh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode pada Rencana Penelitian diperkuat dengan analisis SWOT</li> <li>- Fokus Rencana Penelitian adalah Efektivitas Organisasi Mukim, sedangkan pada Penelitian Terdahulu adalah Perkembangan Mukim</li> <li>- Teori yang digunakan pada Rencana Penelitian adalah Teori Efektivitas Organisasi, sedangkan penelitian terdahulu adalah teori Pengembangan Kelembagaan</li> <li>- Lokasi Rencana Penelitian lebih focus di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat</li> </ul>

### Efektivitas Organisasi Publik

#### • Organisasi

Menurut Thoha (2002:102), “organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu”.

Setiap organisasi baik profit maupun non profit, memiliki tujuan-tujuan yang telah digariskan untuk dapat dicapai melalui program-program kerja.

#### • Efektivitas Organisasi

Menurut Argyris (1968:312), efektivitas organisasi adalah “keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan pemecahan dan pemanfaatan tenaga manusia”. Dalam hal ini, efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan

menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Gibson, *et al* (1996:50-52) juga mengemukakan kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas organisasi yaitu produksi, mutu/kualitas, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan.

Sementara itu, Steers (1985:9-11) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan karakteristik kebijakan dan praktik manajemen.

#### • **Desentralisasi**

Desentralisasi menurut Webster dalam Surianingrat (1981:3) adalah, *“to decentralize means to divide and distribute, as governmental administration; to withdraw from the center or place of concentration”* (desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan; mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi).

Beberapa hal yang menjadi alasan perlunya kebijakan desentralisasi dikemukakan oleh The Liang Gie (1968:35-41), antara lain:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.

- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan.

#### **Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya, seperti *legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control*; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

#### **Pemerintahan Mukim di Aceh**

Otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kesempatan Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Pembagian struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa, “Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi

atas Mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong”.

Mukim dengan imum mukim sebagai pemimpin merupakan lembaga adat yang masih hidup, diakui dan menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat secara damai. Pengalaman sejarah membuktikan, imum mukim bersama masyarakat mukim mempunyai andil yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan dengan efektivitas organisasi Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkap realitas yang terjadi di lapangan, dan lebih *sensitive* dan *adaptif* terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian, serta lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Metode yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli yakni di antaranya seperti Penelitian kualitatif Menurut Neuman (2006:13), dan Neuman (2006:66) penelitian deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kemampuan Menyesuaikan Diri

Ketidakmampuan aparatur Pemerintah Mukim terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi barunya, serta ketidakmampuan aparatur Pemerintah Mukim untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam meninjang pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Sedangkan dari aspek struktur organisasi dan sikap perilaku aparatur, Pemerintah Mukim telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

### Produktivitas

Aspek produktivitas yang tidak efektif dapat diketahui dari lambatnya pelayanan yang diberikan, produk pelayanan yang tidak sesuai, disiplin aparatur yang rendah, dan kapasitas aparatur yang belum memadai.

### Kepuasan Kerja

Perubahan organisasi Mukim dari lembaga adat menjadi organisasi pemerintahan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, ternyata belum diikuti kemampuan meningkatkan kepuasan kerja aparaturnya (persepsi tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai beban yang besar, kecemburuan sosial terhadap Pemerintah Gampong, dan insentif yang rendah).

### Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

#### • Karakteristik Organisasi

Dari aspek desentralisasi kewenangan, belum adanya batasan kewenangan yang jelas antara pemerintah kecamatan, Mukim, dan Gampong. Selain itu, hubungan kerja antara Pemerintah Mukim dengan pemerintah tingkat atas dan tingkat bawahnya sudah berjalan baik, namun dari sisi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Mukim sering tidak dilibatkan.

Di sisi lain, Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan juga belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

#### • Karakteristik Lingkungan

Iklim kerja pada Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan sudah sangat baik dan kondusif. Kondisi ini sangat mendukung efektivitas Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kemukiman.

- **Karakteristik Pekerja**

Aspek proses perekrutan dan penempatan aparatur Pemerintah Mukim yang demokratis sesuai nilai-nilai kearifan lokal, aparatur Pemerintah Mukim selalu menunjukkan perilaku yang baik dan sopan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, di sisi lain karakteristik pekerja pada Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan juga belum mendukung efektivitas Pemerintah Mukim. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja aparatur Pemerintah Mukim, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, serta kurangnya inovasi dan kreativitas aparatur Pemerintah Mukim dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

- **Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, aspek struktur organisasi dan aspek hubungan kerja Pemerintah Mukim dengan pemerintah tingkat atas dan tingkat bawahnya sudah berjalan baik. Sedangkan aspek desentralisasi kewenangan yang tidak jelas. *Kedua*, faktor karakteristik lingkungan adanya iklim kerja yang kondusif dalam organisasi Pemerintah Mukim. Sedangkan aspek yang menghambat adanya persepsi negative masyarakat Mukim dan aparatur Pemerintah Mukim terhadap perubahan Mukim menjadi unit pemerintahan, serta budaya birokrasi Pemerintah Mukim yang lambat.

*Ketiga*, faktor karakteristik pekerja Pemerintah Mukim adalah proses perekrutan dan penempatan aparatur Pemerintah Mukim yang demokratis sesuai nilai-nilai kearifan lokal. Sedangkan aspek yang menghambat adalah kinerja aparatur Pemerintah Mukim yang rendah, tanggung jawab yang kurang terhadap tugas dan fungsinya, serta kurangnya inovasi dan kreativitas aparatur Pemerintah Mukim. *Keempat*, faktor karakteristik kebijakan dan praktik manajemen adanya tujuan strategis

penguatan Mukim menjadi unit pemerintahan untuk ikut mempercepat proses pembangunan. Sedangkan aspek yang menghambat kapasitas aparatur Pemerintah Mukim yang kurang memadai, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang terbatas, ketidakmampuan aparatur Pemerintah Mukim dalam menyerap dan menyampaikan informasi, pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal, serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### **Matriks SWOT Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Berdasarkan identifikasi melalui hasil analisis SWOT yang mengacu pada faktor eksternal dan internal, terdapat sepuluh isu strategis yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan, yaitu:

1. Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina dan meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama dengan semua pihak;
4. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur;
5. Menyediakan sarana/parasana yang memadai;
6. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman;
7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten;
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara intensif dan memberikan *reward and punishman*;
9. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten; dan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

<p style="text-align: center;"><b>Internal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Eksternal</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strength (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi yang lengkap dan jelas</li> <li>2. Kepemimpinan lmeum Mukim yang kuat</li> <li>3. Iklim organisasi yang kondusif</li> <li>4. Potensi sumberdaya Mukim yang cukup besar</li> <li>5. Kehidupan berdemokrasi yang kuat dalam masyarakat</li> <li>6. Sikap dan perilaku aparaturnya yang baik dan sopan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Weaknesses (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas dan kinerja aparaturnya rendah</li> <li>2. Keterbatasan sarana/prasarana</li> <li>3. Keterbatasan anggaran</li> <li>4. Budaya Birokrasi Yang Lambat</li> <li>5. Pemanfaatan potensi sumberdaya Mukim belum maksimal</li> <li>6. Persepsi Negatif dan pesimisme Masyarakat Mukim</li> </ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Opportunities (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi yang memperkuat Pemerintah Mukim</li> <li>2. Kewenangan Mukim bertambah besar</li> <li>3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>4. Kesempatan Yang Sama Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Kapasitasnya</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>SO Strategies</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperjelas dan merinci kewenangan melalui regulasi</li> <li>2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas</li> <li>3. Membina dan meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama dengan semua pihak</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Threats (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Dilibatkan Dalam Pengambilan Keputusan</li> <li>2. Pengawasan Dan Pengendalian Yang Kurang Maksimal</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ST Strategies</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten</li> <li>2. Melakukan pengawasan dan pegendalian secara intensif dan memberikan <i>reward and punishman</i></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WT Strategies</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten</li> <li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</li> </ol>

Sumber: Hasil Penelitian, Data Dianalisis

### Hasil Litmust Test

Dari hasil litmus tes diperoleh lima isu strategis yang dapat diprioritaskan:

1. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya  
 Pengembangan kapasitas aparaturnya Pemerintah Mukim yang dapat dilakukan, di antaranya adalah pelatihan Sekretaris Mukim, pelatihan kelembagaan, maupun pelatihan lainnya dalam upaya membekali aparaturnya Pemerintah Mukim agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi  
 Kewenangan Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan saat ini memang sangat besar, namun dalam pelaksanaannya belum ada kejelasan, rincian, dan batasan kewenangan

Pemerintah Mukim, khususnya kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Kemukiman. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hendaknya segera membuat regulasi untuk memperjelas batasan kewenangan Pemerintah Mukim agar kewenangan yang dimiliki dapat dioperasionalkan dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas.

3. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman  
 Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Mukim adalah menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di Kemukiman secara optimal. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan baik dan benar akan meningkatkan pendapatan asli Mukim yang dapat mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di Kemukiman. Sedangkan potensi sumberdaya manusia yang ada dapat dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk kemajuan dan kemandirian Mukim dan masyarakat Mukim secara keseluruhan.

4. Menyediakan sarana/parasana yang memadai

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan strategi dan prioritas yang sangat penting untuk mendukung terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Mukim. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Mukim adalah sarana perkantoran dan sarana pendukung lainnya.

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Mukim dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan, menyiapkan sumberdaya aparatur yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut.

**Pertama**, Efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, baik dari aspek kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, kemampuan meningkatkan produktivitas kerja, dan

kemampuan meningkatkan kepuasan kerja aparaturnya.

**Kedua**, faktor-faktor yang memengaruhi Efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yaitu: Karakteristik organisasi, Karakteristik pekerja, Karakteristik kebijakan dan praktik manajemen.

**Ketiga**, strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT dan *Litmust Test* untuk meningkatkan efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yaitu:

- Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
- Membina dan meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama dengan semua pihak.
- Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur.
- Menyediakan sarana/parasana yang memadai.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

### Saran

Penelitian tentang Efektivitas Pemerintah Mukim ini masih membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak untuk dapat direalisasikan dalam praktik sehari-hari di lingkungan Pemerintah Mukim Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, Chris. 1968. *Organizational Effectiveness*. Dalam David L Sill S (Ed). *International Encyclopedia of Social Science*. New York: The Maximillan Company and the free press
- Bryson, John M. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. San Francisco: Jossey Bass Publishers

- ..... 2000. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gibson, James L, John M Ivancevich, James H Donnely. 1996. *Organisasi: Perilaku Struktur Proses*. Nunuk Adiarni (Terj). Jakarta: Bina Aksara
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Modul Sosialisasi Sistem AKIP
- Neuman, W Laurence. 2006. *Social Research Methods*. United States of America: Allyn and Bucon
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia: Suatu Analisa*. Jakarta: Dewaruri Press
- The Liang Gie. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers

## Jurnal Ilmiah

- Mukhlis. 2015. *Perkembangan Mukim di Aceh*. Aceh: Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe. Vol. 4 No. 2 (Agustus 2015)
- Tripa, Sulaiman dan Taqwaddin Husin. 2015. *Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat*. Aceh: Jurnal Transformasi Administrasi. Vol. 05 No. 01
- Muzakir dan Husaini Ibrahim. 2017. *Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh: Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*. Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol. 2 No. 2 (Mei 2017)

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Mukim Dalam Kabupaten Aceh Barat